

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara yang baru memperjuangkan kemerdekaan, pada umumnya dicirikan oleh adanya fenomena konflik dan kekerasan. Konflik ini biasanya timbul dari perselisihan karena masalah ekonomi, politik dan agama. Konflik itu sendiri secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana dua atau lebih aktor berjuang untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sama atau setidaknya aktor-aktor tersebut mempunyai posisi yang dipersepsikan dan diyakini berlawanan dalam satu waktu yang sama.¹ Keadaan itu pada akhirnya menimbulkan persaingan dalam kelompok sosial yang berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dan memperlakukan kelompok lainnya secara tidak manusiawi. Perselisihan tersebut tidak hanya sekedar menimbulkan kerusakan bangunan secara fisik tetapi juga menjadi ancaman bagi tatanan kehidupan masyarakat setempat².

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tindakan dari manusia yang memperbudak dan melakukan penganiayaan terhadap sesamanya demi suatu kepentingan dan kekuasaan. Pendidikan Pancasila, misalnya, merupakan pendidikan nilai yang bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.³ Sikap tersebut mewarnai wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia yang memberikan kebebasan dalam mengekspresikan hak dan kewajiban tersebut dengan tetap mengingat dan menghormati hak orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerja sama.⁴ Timor-Timur dalam catatan sejarah, pernah menjadi bagian dari negara Indonesia yang menganut sistem

¹Sandy Nur Ikfal Raharjo, "Analisis Dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia Dengan Warga Distrik Oecussi, Timor-Leste Pada 2012-2013", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 19:13 (Bogor: Agustus 2018), hlm. 6.

² *Ibid.*

³ Hadi Rianto, "Implementasi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Pendidikan Sosial*, 10:30 (Pontianak: Juni 2016), hlm. 81.

⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

Pancasila dan menjunjung tinggi sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Akan tetapi, sila-sila dalam Pancasila yang sejatinya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat justru tidak menguntungkan bagi masyarakat Timor-Timur. Pancasila menjadi batu sandungan bagi masyarakat di Timor-Timur. Krisis ini pun terus berlanjut yang membuat sebagian orang hilang penghargaan terhadap hukum negara dan terus melakukan kejahatan terhadap sesamanya.

Secara historis, fenomena di atas terus berlangsung di Timor-Timur, sejak militer Indonesia masuk ke wilayah tersebut pada tahun 1975. Sejak saat itu, terjadinya perang dan berbagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan di Timor-Timur. Dalam invasi ini, militer Indonesia melakukan bombardir dari laut ke daratan Dili, membunuh masyarakat sipil, melakukan pemerkosaan massal, menjarah toko-toko milik penduduk keturunan Tionghoa, membunuh kelima jurnalis Australia di Balibo, pembantaian di Gereja Suai, pembantaian di pekuburan Santa Cruz, melakukan eksekusi umum di dermaga dan lain sebagainya.⁵ Menurut data yang ada, pada tanggal 14 Februari 1976 juru bicara Timor-Timur, Francisco Lopes da Cruz, menyatakan bahwa 60.000 orang Timor-Timur telah terbunuh sejak penyerbuan Indonesia, yang setara dengan 1.000 kematian setiap hari, dan hampir semuanya adalah orang-orang sipil. Sekitar tanggal 19 November 1976, diperkirakan oleh para pekerja sosial Indonesia bahwa 100.000 orang telah terbunuh pada tahun itu sejak penyerbuan berlangsung.⁶ Secara keseluruhan disetujui bahwa sekurang-kurangnya 200.000 orang telah terbunuh pada awal tahun pendudukan Indonesia. Pasukan Timor-Timur yang dinamakan Falintil paling banyak hanya berkekuatan 20.000 orang, mengakibatkan sebagian besar yang meninggal adalah orang-orang sipil, dan ini merupakan suatu kebijakan yang sengaja dirancang untuk membuat Timor-Timur bertekuk lutut, dan bertujuan untuk memusnahkan suatu kaum secara terencana (genosida).⁷

⁵Jacob J Herin., *The UN is Responsible for Human Rights Abuses East in Timor* (Maumere: Lamaholot, 2022) hlm. 405.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hlm. 406.

Situasi seperti ini membutuhkan pendekatan yang membela dan mengangkat kembali harkat manusia sebagai makhluk yang bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Salah satunya ialah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat terhadap HAM secara tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Persoalan kemanusiaan ini sangat urgen untuk diatasi agar setiap orang dapat memiliki landasan moral untuk lebih menghormati martabat manusia, tanpa adanya kekerasan dan penindasan. Dalam UU No. 39 tahun 1999, tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM disebutkan bahwa “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan makhluk Tuhan yang beradab dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap orang dengan kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁸ .

Gereja Katolik Timor-Timur juga tidak hanya tinggal diam. Gereja Katolik turut terlibat dalam memperjuangkan permasalahan hidup yang dialami oleh masyarakat Timor-Timur. Dalam hal ini, Gereja Katolik membawa iman ke dalam suatu realitas penderitaan masyarakat untuk mengangkat realitas tersebut ke dalam sejarah keselamatan. Demikian Gereja tidak hanya berperan dalam teologi dan bukan hanya mengajar kebijaksanaan dan pengetahuan rasional untuk menjelaskan isi iman secara metodis, sistematis, dan logis untuk menata hidup rohani yang baik, melainkan juga mengejawantakannya melalui tindakan yang benar di tengah masyarakat.⁹ Inilah tantangan baru bagi Gereja yang membutuhkan pemikiran mendalam untuk bisa menentukan strategi pemecahannya. Situasi ini membuat Gereja Katolik dihadapkan pada realitas yang berbeda di luar perhitungannya. Peristiwa ini mendorong Gereja Katolik Timor-Timur untuk semakin responsif terhadap realitas sosial dalam karya pewartaan sabda Allah.

Konsili Vatikan II mendukung dan menghargai upaya untuk membangun serta memperbaiki nasib hidup umat manusia. Pendekatan tersebut menuntut sikap partisipasi Gereja guna mewujudkan suatu kesejahteraan yang harmonis bagi

⁸ *Ibid.*, hlm. 431.

⁹ Hartono Budi, *Teologi, Pendidikan Pembebasan* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 14.

seluruh umat manusia. Ini menjadi suatu refleksi penting bahwa Gereja tidak hanya sekedar menangani masalah surgawi, tetapi juga masalah duniawai.¹⁰ Gereja ingin membantu manusia untuk mencapai perkembangan hidup yang sempurna sebagai citra Allah. Gereja Katolik khususnya hierarki dalam Gereja (uskup, imam, frater dan suster) merasa berkewajiban moral untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, kebebasan dan cinta kasih bagi umatnya.¹¹ Melalui kepercayaan ini, Gereja Katolik mulai mengupayakan rencana-rencana konkret pendampingan umat menuju satu transformasi hidup yang lebih baik. Gereja melihat bahwa masalah kemanusiaan merupakan panggilan moral untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, cinta kasih, dan kebebasan dalam kerja sama dengan semua orang yang memiliki tujuan yang mulia untuk kehidupan manusia.

Gereja mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajarannya tentang masyarakat, mengajukan penilaian moral, apabila hak-hak asasi pribadi atau keselamatan jiwa-jiwa menuntutnya dan sesuai dengan kepentingan semua orang, menurut keanekaan zaman dan suasana. Dengan demikian, tugas yang diemban oleh Gereja bagi orang-orang Timor-Timur ialah tugas spiritual (iman) dan moral. Gereja berusaha agar setiap orang berkewajiban bertindak sesuai dengan norma-norma demokrasi yang sehat dengan mempertahankan secara tegas kepentingan umum dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Pada masa pendudukan Indonesia, penduduk Timor-Timur merupakan kelompok mayoritas Katolik, apabila ditinjau dari komposisi umat beragama. Gereja Katolik juga memiliki kekuatan yang bisa dikatakan setara dengan kaum elit politik (*falintil*) yang memperjuangkan kemerdekaan.¹² Demikian pada masa pendudukan Indonesia, banyak masyarakat Timor-Timur menjadikan Gereja sebagai benteng perlindungan. Tampak bahwa kehadiran Gereja Katolik menarik perhatian mereka, khususnya bagaimana Gereja Katolik berjalan bersama dengan umat untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

¹⁰ Dokumen Konsili Vatikan II. Konstitusi Pastoral *Gaudium Et Spes*, penerj. R. Hardawiryana (Jakarta: Obor, 1993), hlm. 626.

¹¹ Martinho Gusmão da Silva, *Timor Lorosae Perjalanan Menuju Dekolonisasi* (Malang: Dioma, 2003), hlm. 252.

¹² *Ibid.*, hlm. 242

Tidak dapat dimungkiri bahwa terdapat banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia tetapi masih saja ada perbedaan pandangan mengenai perubahan yang dilakukan. Pimpinan Gereja Katolik waktu itu, Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB, pada tahun 1997 secara gamblang mempertanyakan hakikat pembangunan di Timor-Timur yaitu: “untuk apa mengejar ketertinggalan pembangunan di Timor-Timur?”.¹³ Pertanyaan ini pernah dijawab oleh Pemerintah Republik Indonesia bahwa pembangunan berorientasi pada kepentingan rakyat dan untuk masyarakat Timor-Timur, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk membebaskan masyarakat Timor-Timur dari segala bentuk kemiskinan, kebodohan serta segala keterbelakangan. Di sisi lain, pimpinan Gereja setempat mengakui bahwa pembangunan itu dapat menolong menyejahterakan masyarakat Timor-Timur.¹⁴ Akan tetapi, pembangunan itu sendiri menjadi ajang bencana kemanusiaan karena tidak adanya ketentraman, kedamaian, keadilan, kebebasan berpendapat, perlindungan hukum, dan meluasnya pelanggaran hak asasi manusia, teror, intimidasi, penangkapan, penahanan, penculikan bahkan terjadi pembunuhan, adu domba dan lain-lain.¹⁵ Sangat jelas bahwa rakyat Timor-Timur tidak menikmati hasil pembangunan bahkan menjadi tersisih dari hasil kemajuan pembangunan yang dibanggakan tersebut.

Berpijak pada perbedaan pandangan di atas, Gereja Katolik Timor-Timur merasa terpanggil untuk melibatkan diri atas dasar prinsip solidaritas dengan kaum kecil yang tidak berdaya.¹⁶ Partisipasi Gereja Katolik setempat timbul dari satu rasa keprihatinan yang mendalam dan berpusat pada martabat manusia yang harus diselamatkan. Hal ini sesuai dengan seruan *Gaudium et Spes* yang berbunyi

¹³ Frans Sigol Siagan dan Peter Tukan, *Voice of the Voiceless: Kumpulan Hasil Wawancara Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB. Administrator Apostolik Diosis Dili Timor-Timur* (Jakarta: Obor, 1997), hlm. 47.

¹⁴ Budiman Tanuredjo. “Sepenuhnya Tergantung Pada Rakyat.” *Kompas* 16 November 1991.

¹⁵ Aboeprijadi Santoso, *Jejak-jejak Darah: Tragedi dan Pengkhianatan di Timor-Timur* (Yogyakarta: Pijar 1996), hlm.127.

¹⁶ Herminio de Fatima Gonsalves, Partisipasi Gereja Katolik di Timor-Timur dalam pembangunan masyarakat Timor-Timur, Sripsi, STFK 1998, hlm. 3.

kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula.¹⁷

Berangkat dari pengalaman dan rasa solider dan keprihatinan Gereja sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis pun merasa tertarik dan tergerak untuk mengkaji realitas sejarah perjuangan Gereja terhadap kemanusiaan di bawah judul: **PERJUANGAN KEMANUSIAAN GEREJA KATOLIK TIMOR-TIMUR PADA MASA PENDUDUKAN INDONESIA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni: Bagaimana perjuangan kemanusiaan Gereja Katolik Timor-Timur pada masa pendudukan Indonesia?

Adapun beberapa pokok-pokok permasalahan turunan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa itu perjuangan kemanusiaan?
2. Bagaimana situasi masa pendudukan Indonesia di Timor-Timur?
3. Bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang perjuangan kemanusiaan?
4. Bagaimana perjuangan kemanusiaan Gereja Katolik Timor-Timur pada masa pendudukan Indonesia?
5. Mengapa Gereja Katolik memperjuangkan kemanusiaan di Timor-Timur?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk: *pertama*, mendeskripsikan perjuangan kemanusiaan Gereja Timor-Timur dan menganalisis tragedi kemanusiaan dalam peristiwa kependudukan Indonesia di Timor-Timur. *Kedua*, menjelaskan situasi masa pendudukan Indonesia di Timor-Timur. *Ketiga*, mengkaji pandangan Gereja Katolik tentang perjuangan kemanusiaan. *Keempat*, menjelaskan sikap Gereja di Timor-Timur yang tidak

¹⁷ Dokumen Konsili Vatikan II, *op. cit.*, hlm. 59.

terlibat dalam politik praktis pada masa kepedudukan Indonesia. *Kelima*, untuk memenuhi sebagian tuntutan akademis guna memperoleh gelar sarjana Filsafat pada institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Penulis mengkaji buku-buku yang berisikan uraian tentang kemanusiaan dan ajaran-ajaran sosial Gereja untuk menilai perjuangan kemanusiaan Gereja Katolik Timor-Timur dalam seluruh proses keterlibatan Gereja untuk membebaskan masyarakat Timor-Timur dari penindasan. Penulis juga mengutip banyak argumen dan pendapat pro-kontra tentang hakekat perjuangan kemanusiaan Gereja Katolik di Timor-Timur yang dimuat di berbagai artikel.

1.5 Sistematika Penulisan

Seluruh penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam lima bab yang dirincikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, rumusan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran Umum dan Situasi Gereja Katolik di Timor-Timur Pada Masa Pendudukan Indonesia. Pada bab ini, penulis akan menguraikan letak geografis, topografis, identitas etnik kultural, religius dan tragedi dalam sejarah Timor-Timur.

Bab III: Pandangan Gereja tentang Kemanusiaan. Pada bab ini, penulis akan menguraikan pengertian kemanusiaan, macam-macam bidang pendekatan kemanusiaan, pengertian Gereja serta peran sentralistik Gereja dalam mengatasi persoalan kemanusiaan yang memberi dampak negatif

Bab IV: Perjuangan Gereja Katolik dalam Persoalan Kemanusiaan di Timor-Timur. Pada bab ini, penulis akan menguraikan perjuangan Gereja Katolik dalam berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi pada masyarakat Timor-Timur di era pendudukan Indonesia.

Bab V: Penutup. Pada bagian ini memuat kesimpulan dari seluruh karya penulisan ilmiah ini dan usul saran dari penulis.